

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Djoned Gunadi M, *Administrasi Pajak*, LPKPAP BPPK, Jakarta, 2005.
- Idris, Irlan Fery, *Pengantar Perpajakan dengan Teori & Kasus*, ANDI, Yogyakarta, 2014.
- Isroah, *Perpajakan*, Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha (BPPU) Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2013.
- Lutvi Yulia Astuti, Skripsi: “Analisa Hukum Islam Terhadap Pajak Penghasilan UMKM (Studi Atas PP No. 46 Tahun 2013)” (Tulungagung:Iain Tulungagung,2016).
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, ANDI, Yogyakarta, 2011.
- Mokhamad Mujiyanto, Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Analisis Terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah)” (Semarang:Walisongo,2004).
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.
- Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penulisan Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Eresco, Bandung, 1993.

Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus edisi 2*, Salemba Empat, Jakarta, 2003.

Suparno, *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*, Pustaka Magsiter CV. Elangtuo Kinasih, Semarang, 2012.

Supramono dan Theresia Woro Damayanti, *Perpajakan Indonesia - Mekanisme dan Perhitungan*, CV. ANDI OFFSET, Yogyakarta, 2010.

Widi Dwi Ernawati, *Perpajakan Terapan Lanjutan*, (Cetakan Pertama, Oktober 2018), POLINEMA PRESS, Malang.

Wiratni Ahmadi, *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. PT Refika Aditama, Bandung, 2006.

Wirawan Ilyas, *Hukum Pajak (Edisi Revisi)*, Salemba Empat, Jakarta, 2004.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, PER-01/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak, PER-01/PJ/2017 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 /PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

C. Internet:

<http://bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20495-pengelolaan-sumber-penerimaan-pajak-sebagai->

sumber-pendanaan-utama-dalam-pembangunan, diakses pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 12.49 WIB.

<https://forumpajak.org/faqs/siapa-yang-wajib-memiliki-npwp/>, diakses pada tanggal 23 September pukul 21.15 WIB.

<https://www.online-pajak.com/lapor-pajak-online>, diakses pada tanggal 1 Februari 2019, pukul 15.59 WIB.

KBBI. 2018, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, [Online], tersedia di kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan, diakses pada tanggal 17 September 2018.

KBBI. 2018, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, [Online], tersedia di kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaksanaan, diakses pada tanggal 17 September 2018.

KBBI. 2018, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, [Online], tersedia di kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyampaian, diakses pada tanggal 17 September 2018.

-----, *Kamus Hukum Online Indonesia*, [Online], tersedia di kamushukum.web.id/arti-kata/yuridis, diakses pada tanggal 17 September 2018.